

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan.

Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Maka itu, pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Dalam kehidupan sosial ini, tidak lepas dari kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan dan hubungannya bisa saja berubah sehingga proses dari pemberdayaan itu sendiri sangat tergantung pada dua hal, yaitu:

- 1) Bahwa kekuasaan dapat berubah, jika kekuasaan tidak dapat berubah, maka pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
- 2) Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini memungkinkan pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Selain pemberdayaan menunjukan pada kekuasaan, pemberdayaan menunjuk pula pada kemampuan orang. Dimana kemampuan orang memiliki perbedaan dan karakteristik tertentu. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan yang merujuk pada pemenuhan kebutuhan hidup, kebebasan dan sebagainya.

Sementara itu, Mardikanto dan Soebianto (2017:30) menjelaskan bahwa

pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Mardikanto dan Soebianto (2017:61) juga berpendapat bahwa

pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri.

Kedua teori di atas menunjukkan adanya usaha yang harus dilakukan sehingga terjadilah suatu pemberdayaan masyarakat yang memerlukan proses dimana, hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan memerlukan jarak waktu tertentu untuk menjalankan agar proses pemberdayaan sampai hingga visi misi yang diharapkan yakni kesejahteraan masyarakat menjadi masyarakat mandiri.

Begitupun menurut Perkins dan Zemmerman, 1995 (dalam Wrihatnolo dan Dwidjowijoyo, 2007: 179) mendefinisikan bahwa

... pemberdayaan sebagai suatu proses sengaja yang berkelanjutan, berpusat pada masyarakat lokal, dan melibatkan prinsip saling menghormati, refleksi kritis, kepedulian dan partisipasi kelompok, dan melalui proses tersebut orang-orang yang kurang memiliki bagian yang setara akan sumber daya berharga memperoleh akses yang lebih besar dan memiliki kendali atas sumber daya tersebut...

Dengan demikian, sesuai dengan pendapat di atas bahwa pemberdayaan merupakan kekuasaan dan kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh perorangan berdasarkan proses yang dilakukan berdasarkan kerjasama antar

masyarakat yang berdaya dan belum berdaya dengan sasaran utama mereka yang belum berdaya atau lemah.

Semua pengertian pemberdayaan masyarakat di atas dapat disimpulkan bahwasanya pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses, membutuhkan waktu, bertujuan menyejahterakan masyarakat dengan mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat atau perorangan serta menjadikan masyarakat yang mandiri.

b. Sasaran Pemberdayaan Masyarakat

Penjelasan pemberdayaan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses untuk memberdayakan masyarakat atau memajukan masyarakat yang statis. Maka, pemberdayaan masyarakat ini ditujukan pada masyarakat lemah atau masyarakat yang belum berdaya.

Adapun kelompok yang dapat dijadikan sasaran pemberdayaan yakni mereka yang lemah. Dikategorikan kelompok lemah apabila:

- Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender maupun etnis.
- Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, dan sebagainya
- Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang memiliki masalah pribadi.

Sasaran program pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kemandirian juga disampaikan oleh Sumaryadi dalam skripsi Suwondo (2017:26-27) yaitu sebagai berikut:

- Terbuka kesadaran dan tumbuh peran aktif, mampu mengorganisir dan kemandirian bersama;
- Memperbaiki keadaan sosial kehidupan kaum lemah tak berdaya dengan meningkatkan pemahaman, peningkatan pendapatan dan usaha-usaha kecil di berbagai bidang ekonomi ke arah swadaya;
- Meningkatkan kemampuan kinerja kelompok-kelompok swadaya dalam keterampilan teknis dan manajemen untuk memperbaiki produktifitas dan pendapatan mereka.

Program pemberdayaan yang baik harus memiliki sasaran yang tepat dan siap untuk diarahkan, sehingga dengan ini pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan sistematis dan terstruktur. Sasaran pemberdayaan ditunjukkan agar meningkatkan kinerja yang nyata sesuai dengan keterampilan yang ada sehingga diperoleh perbaikan dalam produktifitas dan pendapatan kelompok.

c. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas sehingga, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ini perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilan mencapai tujuan. Tentang hal ini, Mardikanto dan Soebianto (2017:167) secara konseptual, strategi sering diartikan dengan beragam pendekatan, seperti:

- 1) Strategi sebagai suatu rencana yang dijadikan pedoman untuk dijadikan landasan pelaksanaan kegiatan, demi tercapainya tujuan-tujuan yang

ditetapkan. Dalam hubungan ini, rumusan strategi senantiasa memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman eksternal yang dilakukan oleh para pesaingnya.

- 2) Strategi sebagai kegiatan yang merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh setiap individu, organisasi atau perusahaan untuk memenangkan persaingan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau telah ditetapkan.
- 3) Strategi sebagai suatu sistem merupakan satu kesatuan rencana dan tindakan-tindakan yang komprehensif dan terpadu yang di arahkan untuk menghadapi tantangan-tantangan guna mencapai tujuan yng telah ditetapkan.
- 4) Strategi sebagai suatu instrumen merupakan alat yang digunakan oleh semua unsur pimpinan organisasi / perusahaan, terutama manajer puncak, sebagai pedoman sekaligus alat pengendali pelaksanaan kegiatan.
- 5) Strategi sebagai pola pikir merupakan suatu tindakan yang dilandasi oleh wawasan yang luas tentang keadaan internal maupun eksternal untuk rentang waktu yang tidak pendek, serta kemampuan pengambilan keputusan untuk memilih aternatif-alternatif terbaik yang dimiliki untuk memanfaatkan peuang-peluang yang ada, yang dibarengi dengan upaya-upaya untuk menutup kelemahan-kelemahan guna mengantisipasi atau meminimumkan ancaman-ancamannya.

Dari pemahaman tentang beragam pengertian strategi di atas, dapat disimpulkan bahwa apapun pengertian yang akan diberikan, strategi

merupakan suatu proses sekaligus produk yang penting yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenangkan persaingan demi tercapainya tujuan.

Strategi pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mempunyai tiga arah, yaitu:

Pertama, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat;

Kedua, pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat;

Ketiga, modernisasi melalui penunjukan arah perubahan struktur sosial ekonomi, budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, strategi pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Menyusun instrumen pengumpulan data
- 2) Membangun pemahaman, komitmen untuk mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat
- 3) Mempersiapkan sistem informasi, mengembangkan sistem analisis, intervensi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat.

d. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pada hakikatnya, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan pengertian dari pendapat berbagai ahli.

Menurut Suhaemi, Ahmad (2016:55) upaya pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk:

membuat masyarakat menjadi mandiri, dalam arti memiliki potensi untuk mampu memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi, dan sanggup memenuhi kebutuhannya dengan tidak menggantungkan hidup mereka pada bantuan luar, baik pemerintah maupun organisasi – organisasi non-pemerintah.

Pernyataan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwasanya pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan agar masyarakat lemah atau yang belum berdaya menjadi mandiri dalam segala hal sehingga ini dengan sudah mandirinya tiap individu maka masyarakat akan sejahtera. Jika setiap individu (minimal dua orang dalam setiap keluarga) yang belum berdaya di berdayakan dalam suatu program pemberdayaan masyarakat, maka sedikitnya pemberdayaan ini menyejahterakan keluarga, sehingga jika setiap keluarga seperti itu, masyarakat umum bisa mencapai masyarakat yang sejahtera. Selain itu juga, teori di atas menunjukkan bahwasanya dengan pemberdayaan masyarakat, potensi yang dimiliki menjadi pegangan untuk dapat mensejahterakannya artinya pemberdayaan masyarakat perlu memfasilitasi pengembangan potensi yang dimiliki masyarakat.

Sementara, tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan menurut Ambar T. Sulistyani (2004: 80) adalah untuk membentuk individu dan

masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi menggunakan daya kemampuan yang meliputi kemampuan kognitif, psikomotorik, afektif, dengan penerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

Tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga, baik itu dengan meningkatkan usaha yang ada, mengembangkan potensi yang dimiliki atau menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dengan adanya pendampingan yang partisipatif. Meningkatkan potensi masyarakat artinya meningkatkan kualitas hidup masyarakat karna dengan potensi itu dapat dijadikan suatu tolok ukur untuk menciptakan kreatifitas. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan swadaya. Maka, untuk mencapai tujuan tersebut, faktor peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan non formal perlu mendapatkan prioritas.

Karsidi (2013) dalam Skripsi Suwondo (2017:25) menyatakan bahwa memberdayakan masyarakat bertujuan mendidik masyarakat agar mampu mendidik mereka sendiri atau membantu masyarakat agar mampu membantu diri mereka sendiri. Artinya, tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya dengan sederhana agar mampu mandiri yakni untuk memandirikan sendiri agar dapat menyelesaikan dan memecahkan masalah sendiri.

Sementara, dalam penelitian ini tujuan pemberdayaan masyarakat itu sendiri adalah mencapai tujuan dibentuknya kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) pengrajin tas yakni, meningkatkan pendapatan keluarga sehingga terciptanya keluarga yang sejahtera.

e. Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sumodiningrat (2000:45), pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi.

Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan suatu proses yang membutuhkan waktu atau masa. Lebih lanjut, Pranarka dan Vidhyandika (1996) dalam Suhaemi, Ahmad (2016 : 54) menjelaskan bahwa:

proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya yang disebut dengan kecenderungan primer. Kedua, kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Sementara menurut Edy M, Sungkowo (2017 : 44-45), proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap – tahap yang harus dilalui tersebut meliputi:

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan prilaku menuju prilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri yang merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat.

- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan;
- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Ketiga tahap tersebut tentunya pelaku pemberdaya memiliki peran yang sangat penting, yakni dari tahap awal atau pertama pihak pemberdaya harus melakukan persiapan, dimana ia harus dapat menyentuh masyarakat untuk penyadaran dalam peningkatan kapasitas diri. Sentuhan – sentuhan yang harus dilakukan oleh pelaku pemberdaya itu mampu membius masyarakat menjadi sadar merasa sangat membutuhkan adanya pemberdayaan tersebut.

Berlanjut pada tahap kedua yang merupakan tahap transformasi kemampuan. Dalam tahap ini, masyarakat menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan – keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut, diharapkan masyarakat berperan aktif dalam pengembangan keterampilannya dan memahami setiap pengetahuan yang telah didapatkan.

Tahap ketiga merupakan tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kemampuan inovatif yang merupakan pembentukan kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut ditandai dengan adanya kreasi-kreasi, membentuk inisiatif, dan melakukan pembangunan. Setelah mendapatkan

pengetahuan dalam keterampilan dan dapat mengembangkan dari keterampilan itu, maka masyarakat dalam tahap ini diharapkan memiliki keterampilan yang luas sehingga mendapatkan inovasi baru dalam keterampilan yang bersangkutan.

Suharto (2017: 66) menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Selanjutnya, dalam konteks pekerjaan sosial pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*) yaitu:

- Aras Mikro, yang dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, *crisis intervention* dengan tujuan utama adalah melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai Pendekatan yang berpusat pada Tugas
- Aras Mezzo yang dilakukan terhadap sekelompok klien melalui pendidikan dan pelatihan dengan tujuan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
- Aras makro, sebagai strategi sistem besar karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas.

Adi (2013) dalam Eko Arif dan Riyadh Ahmad (2014) menggambarkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri dari lima tahapan utama, yaitu:

- 1) Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan (*Irecall depowering/empowering experiences*);
- 2) Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penidakberdayaan (*discuss reason for depowerment/empowerment*);
- 3) Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek (*identify one problem or project*);
- 4) Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan (*identify usefull power bases*);
- 5) Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya (*develop and implement action plans*).

Praktek pemberdayaan masyarakat yang dilakukan banyak pihak, seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan atau penanggulangan kemiskinan. Karena itu, pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk peningkatan pendapatan (*income generating*).

Tentang hal ini, Sumadyo (Mardikanto dan Soebianto (2017:113)) merumuskan tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yang disebutnya sebagai Tri Bina, yaitu: Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan.

Terhadap rumusan ini, Mardikanto dan Soebianto (2017:113) menambahkan pentingnya Bina Kelembagaan, karena ketiga Bina yang dikemukakan itu hanya akan terwujud seperti yang diharapkan, manakala didukung oleh efektivitas beragam kelembagaan yang diperlukan.

1) Bina Manusia

Yang termasuk ke dalam upaya bina manusia adalah semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan atau pengembangan kapasitas yaitu, mengembangkan kapasitas individu, yang meliputi kapasitas kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan. Pengembangan kapasitas entitas/kelembagaan, yang meliputi:

- a) Kejelasan visi, misi, dan budaya organisasi
- b) Kejelasan struktur organisasi, kompetensi dan strategi organisasi
- c) Pengembangan jumlah dan mutu sumber daya
- d) Interaksi antar individu di dalam organisasi
- e) Interaksi dengan entitas organisasi dengan pemangku kepentingan *stakeholders* yang lain.

Pengembangan kapasitas sistem (jejaring) yang meliputi: Pengembangan interaksi antar entitas (organisasi) dalam sistem yang sama serta pengembangan interaksi dengan entitas/organisasi di luar sistem.

2) Bina Usaha

Bina Usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan karena bina manusia tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi atau non ekonomi) akan menambah kekecewaan. Sebaliknya, hanya bina manusia yang mampu (dalam waktu dekat) memberikan dampak atau manfaat bagi

perbaikan kesejahteraan yang akan memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat.

3) Bina Lingkungan

Terpenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang terkait dengan perlindungan, pelestarian dan pemulihan (rehabilitasi/*reklamasi*) sumber daya alam dan lingkungan hidup.

4) Bina kelembagaan

Kelembagaan sering diartikan sebagai pranata sosial atau organisasi sosial, apabila memenuhi 4 komponen yaitu:

- a) Komponen *person*, dimana orang-orang yang terlibat di dalam suatu kelembagaan dapat teridentifikasi dengan jelas
- b) Komponen kepentingan, dimana orang-orang tersebut pasti sedang diikat oleh kepentingan atau tujuan, sehingga diantara mereka terpaksa harus saling berinteraksi
- c) Komponen aturan, dimana setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut
- d) Komponen struktur, dimana setiap orang memiliki posisi dan peran yang harus dijalankannya secara benar, orang tidak bisa merubah-rubah posisinya dengan kemauan sendiri.

f. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Suharto (2006:64) mengatakan akibat dari pemahaman hakikat pemberdayaan yang berbeda-beda, lahirah dua sudut pandang tersebut memberikan implikasi atas pendekatan yang berbeda pula di dalam melakukan langkah pemberdayaan masyarakat.

Pendekatan pertama, memahami pemberdayaan sebagai suatu sudut pandang konfliktual, yang didasarkan pada perspektif konflik antara pihak yang memiliki daya/kekuatan di satu sisi dan yang berhadapan dengan pihak lemah disisi lainnya. Sudut pandang ini lebih populer dengan istilah *zero-sum*.

Pendekatan kedua bertentangan dengan pendekatan yang pertama, jika yang pertama proses pemberdayaan mengakibatkan berkurangnya daya pada pihak yang lemah, justru sudut pandang yang kedua berpegang pada prinsip sebaliknya. Manakala terjadi proses pemberdayaan dari pihak yang berkuasa / berdaya kepada pihak yang lemah, justru akan memperkuat daya pihak pertama, dengan demikian kekhawatiran yang terjadi pada sudut pandang pertama tidak berlaku pada sudut pandang kedua. Sudut pandang ini lebih populer dengan nama *positive-sum*.

Masih menurut Suharto (2006:67) Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan.

- Pemungkinan: untuk menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
- Penguatan: yang memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya.
- Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas kelompok-kelompok kuat.
- Penyokongan, yang memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.
- Pemeliharaan, untuk memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam bermasyarakat.

2. Pemberdayaan Keluarga

Keluarga menurut sejumlah ahli adalah sebagai unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua institusi, merupakan kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi (UU Nomor 10 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 10; Khairuddin 1985; Landis 1989; Day et al. 1995; Gelles 1995; Ember dan Ember 1996; Vosler 1996). Menurut *U.S. Bureau of the Census* Tahun 2000 keluarga terdiri atas orang-orang yang hidup dalam satu rumah tangga

(Newman dan Grauerholz 2002; Rosen (Skolnick dan Skolnick 1997) dalam Puspitawati (2013:1).

Keluarga memiliki makna sentral dalam realitas sosial. Dalam ilmu ekonomi dikenal *domestic economy* dan *subsistence economic* yang kajiannya terpusat pada keluarga. Sehingga dengan itu, keluarga merupakan peran utama dalam peningkatan ekonomi di masyarakat. Jika setiap keluarga memiliki ekonomi yang lebih baik otomatis di suatu kampung memiliki masyarakat yang ekonominya lebih maju dan baik.

Peningkatan atau perbaikan dalam ekonomi, sebagaimana di sebutkan bahwa keluarga merupakan domestik ekonomi dan substansi ekonomi memiliki peran dalam peningkatan ekonomi. Dengan itu maka, perlu adanya strategi. Strategi yang dimaksud adalah pemberdayaan keluarga. Sebagaimana Utomo (2014:77) menyatakan bahwa keluarga yang menjadi inti dalam masyarakat dan bangsa sekaligus menjadi fokus pemberdayaan. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat menjadi bidang garapan utama.

Pengertian di atas jelas sekali peran keluarga dalam peningkatan ekonomi melalui pemberdayaannya. Sudah barang tentu, adanya pemberdayaan keluarga ini memiliki tujuan sebagaimana pemberdayaan masyarakat pada umumnya yaitu mencapai kesejahteraan keluarga. Melalui pemberdayaan keluarga ini maka, bisa jadi dalam satu masyarakat di kampung, setiap keluarga yang berpartisipasi dalam pemberdayaan keluarga,

menjadi pemberdayaan masyarakat dan menjadikan keluarga sejahtera hingga masyarakat yang sejahtera.

Sebelumnya telah di uraikan mengenai kesejahteraan. Lalu, dari pemberdayaan keluarga sama menghasilkan keluarga sejahtera. Sementara kesejahteraan keluarga di Indonesia oleh pemerintah selama ini dikelompokkan kedalam dua tipe (Suyoto, 2004:53) yaitu pertama, tipe keluarga pra-sejahtera adalah keluarga yang masih mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya berupa sandang, pangan, dan papan. Kedua, tipe keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera identik dengan keluarga yang anaknya dua atau tiga, mampu menempuh pendidikan secara layak, memiliki penghasilan tetap, sudah menaruh perhatian terhadap masalah kesehatan lingkungan, tidak rentan terhadap penyakit, mempunyai tempat tinggal dan tidak perlu mendapat bantuan sandang dan pangan.

Selanjutnya, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2014) menentukan indikator tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan, adapun indikatornya sebagai berikut:

- 1) Enam indikator tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) dengan kriteria sebagai berikut:
 - Pada umumnya anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
 - Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda dirumah/pergi/bekerja/sekolah.
 - Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dan

- Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan.
- Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi sarana pelayanan kontrasepsi.
- Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

2) Delapan indikator Keluarga Sejahtera II (KS II), meliputi:

- Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah agama.
- Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan lauk daging/ikan/telur.
- Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.
- Luas lantai paling kurang 8 m² untuk tiap penghuni.
- Tiga bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat dan
- Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
- Anggota keluarga umur 10 - 60 bisa, bisa baca tulis latin.
- PUS dengan anak hidup 2 atau lebih saat ini memakai alat kontrasepsi.

3) Keluarga sejahtera tahap III, meliputi:

- Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
- Sebagian penghasilan keluarga ditabung dala bentuk uang dan barang.
- Keluarga makan bersama paling kurang sekali sehari untuk berkomunikasi.
- Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat dilingkungsn tempat tinggal.

- Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/TV/radio

4) Keluarga sejahtera tahap III Plus, meliputi:

- Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materil untuk kegiatan sosial.
- Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus pengumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.

3. Konsep Ibu-Ibu

Ibu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah wanita yang telah melahirkan seseorang. Ibu adalah seseorang yang mempunyai banyak peran, peran sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anaknya, dan sebagai seseorang yang melahirkan dan merawat anak-anaknya. Ibu juga bisa menjadi benteng bagi keluarganya yang dapat menguatkan setiap anggota keluarganya (Santoso, 2009).

Sementara ibu rumah tangga menurut kamus besar bahasa indonesia, dapat diartikan sebagai seorang wanita yang mengatur penyelenggaraan berbagai macam pekerjaan rumah tangga, atau dengan pengertian lain ibu rumah tangga merupakan seorang istri (ibu) yang hanya mengurus berbagai pekerjaan dalam rumah tangga (tidak bekerja di kantor).

Sehingga ibu –ibu merupakan sekumpulan wanita yang memiliki banyak peran. Kemudian peran ibu menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal sifat kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan situasi tertentu. Peranan ini didasari oleh harapan dan pola perilaku dalam keluarga, kelompok, dan masyarakat. Adanya peran ibu sebagai berikut:

- a. Sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya
- b. Mengurus rumah tangga
- c. Sebagai pengaruh dan pendidik anak-anaknya
- d. Sebagai pelindung anak-anaknya
- e. Pencari nafkah tambahan dalam keluarga (Zulfajri EM dalam Suparyanto:2010).

Sementara, menurut Effendi dalam sebuah blogspot, peranan ibu adalah sebagai istri dari suami dan ibu dari anak-anak. Ibu mempunyai peranan penting untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya serta sebagai anggota dalam keluarga.

Kemudian lepas dari itu, dalam suatu blogspot yang di unggah oleh oleh Unimus, Purwadarminta menyebutkan Ibu bekerja adalah ibu yang melakukan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mencari nafkah. Selain itu motif ibu bekerja adalah untuk aktualisasi diri guna menerapkan ilmu yang telah dimilikinya.

Masih di suatu unggahan yang sama, menurut Rachmani motif bekerja pada ibu dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Karena keharusan ekonomi, untuk meningkatkan ekonomi keluarga

Hal ini terjadi karen ekonomi keluarga yang menuntut ibu untuk bekerja. Misalnya saja bila kehidupan ekonomi keluarganya kurang,

penghasilan suami kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga sehingga ibu harus bekerja.

b. Karena ingin mempunyai atau membina pekerjaan

Hal ini terjadi sebagai wujud aktualisasi diri ibu, misalnya bila ibu seorang sarjana akan lebih memilih bekerja untuk membina pekerjaan.

c. Karena kesadaran bahwa pembangunan memerlukan tenaga kerja baik tenaga kerja pria maupun wanita

Hal ini terjadi karena ibu mempunyai kesadaran nasional yang tinggi bahwa negaranya memerlukan tenaga kerja demi kelancaran pembangunan.

Ibu bekerja merupakan peran sebagai akibat pergeseran nilai. Dahulu ibu hanya berfokus pada anak dan urusan rumah tangga, sedikit sekali ibu yang bekerja tapi sekarang banyak ibu mempunyai peran ganda sebagai pengasuh dan pendidik anak.

4. *Social Group Work*

a. *Pengertian Social Group Work*

Suatu individu tidak dapat dipisahkan dari kelompok, bahwa individu – individu hanya akan dapat mencapai pengembangan potensi mereka yang setinggi-tingginya serta perasaan harga diri yang kuat melalui partisipasi mereka dalam kehidupan kelompok juga bahwa mereka dapat memperoleh rasa aman dan tentram dengan adanya perasaan keterlibatan dan rasa memiliki suatu kelompok yang mempunyai arti bagi mereka, serta bahwa mereka memiliki tanggung jawab terhadap orang lain

di dalam dan melalui antar hubungan tersebut. Maka, *social group work* hadir sebagai pengembangn metode bimbingan suatu kelompok.

Social group work didasarkan atas pengetahuan mengenai kebutuhan-kebutuhan manusia untuk berhubungan satu sama lain dan adanya saling ketergantungan di antara mereka. Menurut Wibhawa, B dkk (2010:99) *social group work* merupakan suatu metode untuk memperkecil atau menghilangkan hambatan-hambatan dalam berinteraksi sosial, dan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diterima secara sosial.

HB Trecker (1972) (Fitrah, 2014) berpendapat bahwa *Social Group Work* adalah

suatu metoda dimana individu-individu yang terikat dalam suatu kelompok dibantu oleh pekerja sosial, dibimbing mengikuti kegiatan kelompok, sehingga individu-individu tersebut dapat bergaul dengan sesama anggota kelompok secara baik, dan dapat mengambil manfaat dari pengalaman-pengalaman pergaulan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencapai kemajuan atau perkembangan pribadi, kelompok dan masyarakat.

Kemudian, Soetarso (1976:72) mengemukakan bahwa *Social Group Work* adalah

suatu metode untuk bekerja dengan dan menghadapi orang-orang di dalam suatu kelompok, guna peningkatan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosial; serta guna pencapaian tujuan-tujuan yang secara sosial dianggap baik

Ciri-ciri kelompok yang dibimbing atau dibina oleh pekerja sosial kelompok adalah :

- Kelompok kecil (*small group*) bukan organisasi, apalagi masyarakat. Kelompok kecil biasanya berukuran lima sampai tujuh orang, atau enam sampai delapan orang.

- Kelompok Sosial (*social group*), bukan kelompok statistik (kelompok menurut jenis kelamin, usia, dan lain-lain) dan bukan pula kumpulan (kerumunan).
- Kelompok yang terorganisasi (*organized group*), bukan kelompok yang terorganisasi (*unorganized group*). Maksudnya adalah setelah kelompok dibentuk, kemudian diorganisasikan.
- Kelompok yang sengaja dibentuk (*invontulary group*), bukan kelompok yang terbentuk secara alamiah (*voluntary group*). Artinya keluarga dan kelompok sebaya bukan sasaran pekerjaan sosial kelompok.

b. Tujuan *Social Group Work*

Social group work memiliki beberapa tujuan. Menurut Albert S (Psbrumbai, 2009) tujuan dari *social group work* dalam proses pekerjaan sosial adalah sebagai berikut:

1) Tujuan yang bersifat korektif

Melalui *social group work*, pekerja sosial memberikan pengalaman-pengalaman *restoratif* (perbaikan) dan *remedial* (pengembangan) terhadap disfungsi personal dan sosial atau perpecahan individu – individu di dalam situasi sosial.

2) Tujuan yang bersifat preventif

Menggunakan *social group work*, pekerja sosial berupaya untuk mencegah perpecahan pribadi dan sosial dimana terjadi kemunduran yang dapat membahayakan bagi keberfungsian sosial klien.

3) Pertumbuhan dan Perkembangan yang Normal

Tujuan ini lebih menitikberatkan pada suatu situasi dan kondisi dimana terjadi masa-masa tertentu dalam siklus kehidupan klien yang menekan kondisi klien.

4) Peningkatan Pribadi

Tujuan ini dapat dilakukan melalui hubungan – hubungan antar pribadi yang berarti dan bermakna serta dapat menstimulasi munculnya perilaku yang adaptif.

5) Tanggung Jawab dan Partisipasi Anggota

Melalui *social group work*, dapat menjadi media untuk menanamkan nilai – nilai demokratis, berlatih untuk bertanggung jawab baik secara individu, anggota kelompok maupun anggota masyarakat.

c. Fungsi *Social Group Work*

Fungsi *social group work* adalah mengusahakan terciptanya pengalaman - pengalaman yang menyenangkan dan yang memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk berinteraksi, berpartisipasi, dan menyatakan perasaannya. Pada dasarnya fungsi *social group work* adalah :

- Menolong individu yang tertekan atau mengalami masalah.
- Menolong kelompok itu sendiri untuk mencapai tujuannya.
- Mengadakan kegiatan- kegiatan yang bersifat preventif dan pengembangan.

d. Prinsip *Social Group Work*

Sedangkan prinsip social group work menurut H. B. Trecker (Fitrah, 2014) mengatakan sebagai berikut :

1) Prinsip pembentukan kelompok terencana

Dalam *social group work*, kelompok merupakan kesatuan tempat dimana para individu memperoleh pelayanan untuk mengembangkan pribadinya.

2) Prinsip tujuan khusus

Dalam bimbingan sosial kelompok memiliki tujuan khusus untuk perkembangan individu dn kelompok harus dirumuskan dengan cermat oleh pekerja sosial kelompok agar dengan demikian terdapat keserasian antara harapan dan kemampuan kelompok.

3) Prinsip hubungan petugas kelompok yang bertujuan

Dalam bimbingan ini harus dibina adanya hubungan yang bertujuan diantara pekerja sosial dengan anggota kelompok dan atas dasar keyakinan bahwa pekerja sosial akan menerima anggota kelompok sebagaimana adanya keadaan mereka.

4) Prinsip individualisasi yang terus menerus

Dalam prinsip ini, kita mengenal bahwa kelompok itu berbeda- beda dan setiap anggota kelompok itu menggunakan pengalaman kelompok dengan bermacam- macam cara untuk memenuhi kebutuhannya.

5) Prinsip interaksi kelompok yang dipimpin

Dalam *social group work*, sumber kekuatan utama untuk menggerakkan kelompok dan memperngaruhi individu anggota kelompok untuk melakukan adalah interaksi untuk saling pengaruh mempengaruhi diantara anggotanya.

6) Prinsip demokrasi dalam menentukan keinginan kelompok sendiri

Kelompok harus dibantu dalam mengambil keputusan-keputusannya dan keinginan-keinginannya sebanyak mungkin dibimbing untuk bertanggung jawab sesuai dengan kemampuannya.

7) Prinsip fungsi organisasi yang fleksibel

Proses yang dipergunakan oleh pekerja sosial untuk membina dalam tata kerja yang formal sama pentingnya dengan susunan organisasi itu sendiri. Organisasi harus fleksibel dan harus didorong bila sedang berusaha mencapai tujuan yang sama penting.

8) Prinsip pengalaman program

Sebaiknya program dalam kelompok dimulai sesuai dengan minat anggota, kebutuhan dan pengalaman dan keinginannya, serta harus diusahakan guna memajukan perkembangan kelompok.

9) Prinsip penggunaan sumber

Sumber-sumber yang ada dalam masyarakat maupun yang disekitar badan sosial atau lembaga sosial harus dapat dipergunakan untuk memperkaya pengalaman kelompok, untuk kemanfaatan anggota dan kelompok itu sendiri.

10) Prinsip penilaian

Penilaian yang terus menerus terhadap proses dan hasil program atau pekerjaan kelompok adalah sangat penting, kelompok dan badan sosial harus mengambil bagian dalam pelaksanaan penilaian ini

e. Tipe – tipe Kelompok dalam *Social Group Work*

Tipe – tipe kelompok yang dapat dijadikan alternatif pemecahan masalah dalam pekerjaan sosial dengan kelompok (*Social group work*) (Yurika, 2015) antara lain :

1) *Social Conversation Group* (Kelompok Percakapan Sosial)

Social conversation group ini sering digunakan untuk tujuan menguji dan menentukan seberapa dalam suatu hubungan dapat dikembangkan antara orang – orang yang belum saling mengenal dengan baik. Percakapan sosial ini sering menghilang dan cenderung berubah tanpa tujuan, didalamnya tidak terdapat topik – topik yang teragenda secara formal.

2) *Recreation Group* (Kelompok – kelompok Rekreasi)

Tujuan kelompok ini adalah memberikan kegiatan – kegiatan untuk kesenangan yang bersifat spontan, tidak harus ada pemimpin tempat dan peralatan tidak perlu banyak artinya, akomodasi bersifat praktis. Contoh, permainan terbuka di lapangan.

3) *Recreation Skill Group* (Kelompok – kelompok Rekreasi Keterampilan)

Tujuan kelompok ini adalah untuk meningkatkan beberapa keterampilan dan pada waktu bersamaan memberikan pula kesenangan berbeda dengan kelompok – kelompok rekreasi yang memerlukan penasehat, pelatih dan instruktur serta lebih berorientasi pada aturan permainan. Contoh, tim - tim olahraga yang saling berkompetensi dalam olahraga renang, basket, golf atau yang bersifat seni.

4) *Educational Group* (Kelompok Pendidikan)

Fokus kelompok ini adalah untuk memperoleh pengetahuan dan mempelajari keterampilan-keterampilan yang lebih kompleks. Pemimpin biasanya seorang profesional yang benar – benar terlatih dan ahli dalam bidang – bidang tertentu. Misalnya topik – topik yang mencakup praktek – praktek keterampilan kursus kecantikan dan lain – lain.

5) *Problem Solving Decission* (Kelompok Pemecah Masalah dan Pengambilan Keputusan)

Kelompok ini pihak penerima dan pihak penerima pelayanan – pelayanan sosial dapat secara bersama – sama terlibat dalam kegiatan pemberi pelayanan menggunakan pertemuan – pertemuan untuk mencapai tujuan suatu rencana pengembangan bagi seorang klien atau sekelompok klien. Kelompok harus dapat memutuskan bagaimana mengalokasikan sumber – sumber dana yang terbaik juga memutuskan

bagaimana memperbaiki pelaksanaan pelayanan bagi klien merubah keputusan-keputusan kebijakan dari lembaga, memutuskan bagaimana memperbaiki usaha – usaha koordinasi dengan lembaga lain.

6) *Self Help Group* (Kelompok Bantu Diri)

Kelompok – kelompok bantu diri menjadi semakin populer dan sering di anggap berhasil dalam membantu individu – individu yang mempunyai masalah pribadi atau masalah sosial. Definisi kelompok bantu diri adalah suatu kelompok kecil yang disusun untuk membantu dan untuk mencapai tujuan khusus serta bersifat sukarela. Kelompok bantu diri ini dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut:

- Kelompok yang memiliki fokus perhatian pada pemecahan masalah yang di alami oleh diri sendiri, seperti kelompok penyandang masalah narkoba dan lain-lain.
- Kelompok yang memiliki fokus pada advokasi sosial seperti kelompok yang hak-hak penyandang cacat dan sebagainya.
- Kelompok yang memiliki fokus untuk menciptakan pola hidup alternatif misalnya kelompok-kelompok keagamaan yang menciptakan alternatif kehidupan baru untuk mencapai ketenangan atau kebahagiaan yang hakiki.
- Kelompok orang yang merasa dirinya tersisih / tersingkir. Kelompok ini memberikan perlindungan kepada orang-orang yang merasa tertekan oleh anggapan-anggapan buruk dari

masyarakat seperti kelompok eks narapidana, eks penyandang narkoba dan sebagainya.

7) *Socialization Group* (Kelompok Sosialisasi)

Banyak penulis yang menganggap bahwa tipe kelompok ini merupakan fokus utama *group work*. Secara umum tujuannya untuk mengembangkan atau mengubah sikap-sikap dan perilaku-perilaku anggota kelompok agar dapat lebih diterima secara sosial. Fokus-fokus lainnya adalah pengembangan keterampilan sosial, meningkatkan kepercayaan diri dan merencanakan masa depan. Misal, bekerja untuk sekelompok lanjut usia pada rumah perawatan untuk memotivasi mereka agar mau terlibat dalam berbagai kegiatan.

8) *Therapeutic Group* (Kelompok Penyembuhan)

Pada umumnya kelompok terapi ini terdiri dari orang-orang yang memiliki masalah-masalah emosional yang agak berat, misalnya, orang-orang yang memiliki kepribadian ganda, kelainan jiwa dan sebagainya.

9) *Sensitivity Group* (Kelompok Melatih Kepekaan)

Inti dari kegiatan kelompok ini adalah melakukan percakapan yang mendalam dengan sepenuh hati dan jujur tentang mengapa mereka berperilaku seperti itu dalam kelompok, tujuan kelompok ini yaitu untuk memperbaiki masalah kesadaran antar pribadi. Untuk mencapai suatu perubahan maka, diperlukan tahap-tahap sebagai berikut:

- Tahap *Unfreezing* yang terjadi ketika harapan-harapan kita tidak tercapai. Pemimpin biasanya mulai dengan pernyataan yang mendorong anggota-anggota kelompok untuk berpartisipasi, terbuka dan jujur serta mengharapkan perasaan menjadi berbeda.
- Tahap *Change* yaitu dengan reaksi-reaksi spontan, atau memberikan *feed back* (umpan balik) kepada orang lain.
- Tahap *Refreezing* yaitu pembekuan kembali, dimana perubahan yang telah dicapai diusahakan tidak mengalami perubahan atau penurunan sehingga perlu pembekuan. Tujuan tahap ini adalah perubahan dapat berjalan secara *continue* sehingga dapat berinteraksi secara efektif.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Dalam peneltian ini, adapun penelitian sejenis yang telah di lakukan oleh orang lain berkaitan dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha”, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Penelitian pertama di lakukan oleh Intan Riana Dewi dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016 dengan judul penelitian “Efektifitas Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Terhadap Kelompok Soka Di Gunungketur Pakualaman Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Keefektifan program UPPKS di Kelompok Soka Gunungketur, Kecamatan Pakualaman Yogyakarta. Dalam penelitian ini, diketahui bahwa terdapat program dalam UPPKS yang dikatakan efektif dan belum efektif. Dikatakan efektif bahwa

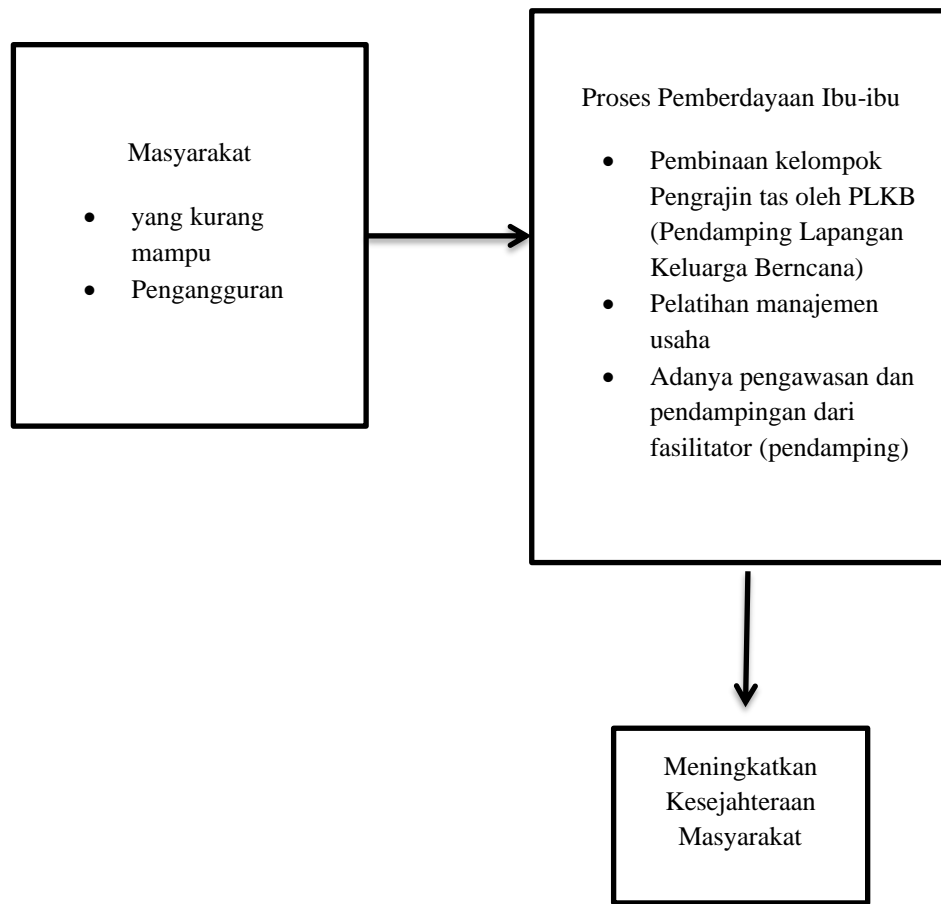
program ini berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh penyelenggara program, kemudian dilihat dari ketepatan waktu dalam pelaksanaan berbagai kegiatan serta tercapainya tujuan yang telah dicapai oleh kelompok UPPKS Soka ini. Selain itu, dari hasil penelitian bahwa keefektifannya dilihat juga berdasarkan perubahan nyata dari para anggota yang memang telah merasakan perubahannya. Sementara dari hasil penelitian yang dikatakan belum efektif karena kurangnya sosialisasi dari pihak penyelenggara kepada penerima program.

- 2) Penelitian yang kedua dilakukan oleh Riska Ayu Pratiwi dari Universitas Lampung pada tahun 2017 dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga-Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (UP2K-PKK)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga-Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (UP2K-PKK) di Kecamatan Tejosari, Kota Metro. Dalam isinya, penelitian ini membahas mengenai pengertian pemberdayaan masyarakat dari berbagai teori dan lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat, strategi pemberdayaan masyarakat dan tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta pembahasan mengenai Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Kemudian hasil dari penelitian ini bahwa sesuai dengan indikator pengembangan ekonomi program UP2K-PKK masih belum berkembang karena terkendala dari pemasaran produk.

- 3) Penelitian ketiga dilakukan oleh Suwondo dari Universitas Negeri Semarang pada tahun 2017 dengan judul “Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera (UPPKS) Sahabat Kelurahan Langensari Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1).proses pemberdayaan masyarakat melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera di Kelurahan Langensari Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang; (2).strategi yang digunakan didalam kelompok UPPKS guna pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Langensari Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang; (3).faktor-faktor yang menghambat pemberdayaan masyarakat dalam kelompok UPPKS di Kelurahan Langensari Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Penelitian ini berisikan penjelasan teori pemberdayaan masyarakat dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat yang diterapkan di kelompok UPPKS “Sahabat” yaitu menggunakan pendekatan partisipasi aktif; strategi yang digunakan dalam kelompok UPPKS “Sahabat” adalah menggunakan strategi pendekatan dan pendampingan; faktor yang mempengaruhi baik yang mendukung ataupun yang menghambat dalam kelompok UPPKS “Sahabat” terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran atau kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting berdasarkan Sugiyono (2012:60). Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berawal dari pokok pikiran tentang penerapan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) pengrajin tas di Kelurahan Sukamaju Kaler. Masyarakat yang merupakan kumpulan dari berbagai keluarga dengan catatan keluarga yang belum sejahtera membutuhkan adanya pencapaian untuk mensejahterakan masyarakat, pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu strategi dimana didalamnya terdapat kegiatan usaha kelompok yang dibina dan dibimbing berupa pelatihan dan manajemen usaha sehingga menghasilkan peningkatan pendapatan keluarga dan mencapai tujuan utama yakni keluarga sejahtera. Lihat pada Gambar. 2.1



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

Masyarakat Sukamaju Kaler masih terdapat masyarakat yang tak mampu dan pengangguran maka Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) hadir sebagai solusi dimana ia kegiatan melalui UPPKS ini merupakan proses pemberdayaan masyarakat yang membentuk sebuah kelompok pengrajin tas berdasarkan keinginan masyarakat serta potensi yang didukung oleh sosialisasi dari pendamping UPPKS. Sehingga dengan ini, kelompok pengrajin tas mendapatkan pelatihan, pembinaan, pengawasan dan pendampingan dari pendamping yang bertujuan untuk peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.